

ABSTRAK

PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PPN DAN PPn BM UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 1994 DENGAN PPN DAN PPn BM UNDANG-UNDANG No.18 TAHUN 2000

Hendry Sahtar Sagala
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan prosedur pemungutan, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menurut PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000, serta keunggulan dari adanya perubahan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 menjadi PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.

Data yang diperlukan adalah PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000, serta literatur-literatur dan buku-buku yang mendukung penelitian ini.

Langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah; pertama, mencari teori yang mendukung, memahami proses pemungutan dan mengumpulkan informasi yang mendukung; kedua, mengumpulkan teori tentang proses penghitungan dan membandingkan Dasar Pengenaan Pajak; ketiga, membandingkan peraturan, menguraikan tujuan dan mencari persamaan dan perbedaan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa (1) tidak ada perubahan dalam tata cara pemungutan yang dilakukan dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000, tetapi pemerintah mengubah batas waktu pemungutan, pelaporan dan penyetoran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dan Badan-badan tertentu, (2) tidak ada perubahan dalam tata cara penghitungan yang dilakukan dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000, tetapi pemerintah melakukan penyederhanaan dalam prosedur restitusi (3) keunggulan dari PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 yaitu: memberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang tidak dikenakan pajak, untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah, Pengusaha Kena Pajak yang belum mempunyai Pajak Masukan tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan, penyederhanaan administrasi perpajakan yang meliputi prosedur restitusi, tidak lagi memberikan kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan atau perubahan bentuk usaha atau pengalihan aktiva tetap, kemudahan perpajakan tersebut diberikan untuk kegiatan yang meningkatkan daya saing dan memperlancar pembangunan nasional.

ABSTRACT

THE COMPARISON BETWEEN THE REGULATION OF VALUE – ADDED TAX AND LUXURY- TAX LAW NUMBER 11, 1994 AND NUMBER 18, 2000

Hendry Sahtar Sagala
Sanata Dharma University
Yogyakarta

The objectives of this research are to compare the procedure of collecting and counting of Value – Added Tax of goods and services and Luxury Tax Law number 11, 1994 and Value – Added Tax of goods and services and Luxury Tax Law number 18, 2000; and to observe the benefit of the regulation change from Value-Added Tax Law number 11, 1994 into Value-Added Tax Law number 18, 2000.

The data needed data are Value- Added Tax and Luxury Tax Law number 11, 1994 and Value-Added Tax and Luxury Tax Law number 18, 2000 and some helpful literatures and books.

To solve the problems, some steps are taken out, they were: first, look for a supporting theories. Second, collect theories about counting process and lastly, compare the regulations and analyze the purpose, similarities and differences between Value-Added Tax and Luxury Tax according to the Law number 11, 1994 and number 18, 2000.

The result of the analysis showed that **(1)** there were no changes in the procedure of collecting tax in Value-Added Tax and Luxury Tax according to the law number 11, 1994 and number 18, 2000 but the government has changed the due time of collecting, reporting and payment done by government's accountant and certain related institutions.**(2)** It is also found out that there was no change in the

procedure of counting of Value-Added Tax and Luxury Tax according to the law number 11,1994 and number 18,2000 but there was a simplification in the restitution process by the government.(3) The benefits of the regulation change are; giving a legal support regarding non-tax goods, controlling the society's consumption pattern and balancing the society's income between a high and a low one; the taxable-businessmen not yet having an Incoming-Tax are still able to credit the Incoming-Tax, the simplifications of tax administration which include the restitution process, and removing of tax ease on merging transaction or changing pattern of business or fixed-assets transfer. Such ease in tax is given only to activities that increase the competition and help the National Development